



RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020

KEBIJAKAN SINKRONISASI DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH

Budiono Subambang

Bandung, 9 Maret 2020



TINDAK LANJUT RAKOR PUSDA DI SENTUL, BOGOR 13 NOV 2019



PRESIDEN RI



WAKIL PRESIDEN RI



MENTERI DALAM NEGERI

Pertama, Pembangunan SDM akan jadi prioritas utama kita
Kedua, Pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan
Ketiga, Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas
Keempat, Penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran
Kelima, Transformasi ekonomi

5

Fokus Kerja

7 Agenda Pembangunan

Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 - 2024



Kementerian Dalam Negeri berperan mendorong pemerintah daerah mendukung fokus kerja pemerintah dalam bentuk pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KORTEKRENBANG



SINKRONISASI DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH - RAKORTEKRENBANG

KEGIATAN KORTEKRENBANG



Kemendagri, Bappenas dan Kementerian/Lembaga dapat membahas penjabaran sasaran nasional dengan Pemerintah Daerah



melakukan konfirmasi terkait kesiapan pelaksanaan kegiatan proyek prioritas nasional di daerah



memperoleh informasi terkait dukungan pemerintah daerah melalui APBD dalam mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional



mendapat masukan terkait usulan kegiatan Renja K/L dan pendanaan melalui APBN untuk mendukung prioritas nasional, baik kewenangan pusat maupun daerah

TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL

K/L



PROV+KAB/KOTA

sinkronisasi dan harmonisasi koordinasi teknis dikoordinasikan oleh MDN dengan Menteri Bidang Perencanaan

TARGET PEMBANGUNAN PROVINSI

PROV



KAB

koordinasi teknis pembangunan dilaksanakan oleh **GUBERNUR** sebagai wakil Pemerintah Pusat

PEMBANGUNAN DAERAH

- **peningkatan & pemerataan pendapatan masyarakat**
- **kesempatan kerja**
- **lapangan berusaha**
- **meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik**
- **daya saing Daerah**



Peran Pemerintah Provinsi Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Rakortek Perencanaan Pembangunan Daerah

RKP 2021 mengusung tema “Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”.

didasarkan pada kebijakan *money follows program* yang dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.

Maka Pendekatan Perencanaan Perlu Diperkuat Pemerintah Provinsi Untuk Mewujudkan:

integrasi perencanaan antara pusat (RKP) dan daerah (RKPD)

penguatan perencanaan spasial (kesiapan dan keakuratan lokasi pembangunan)

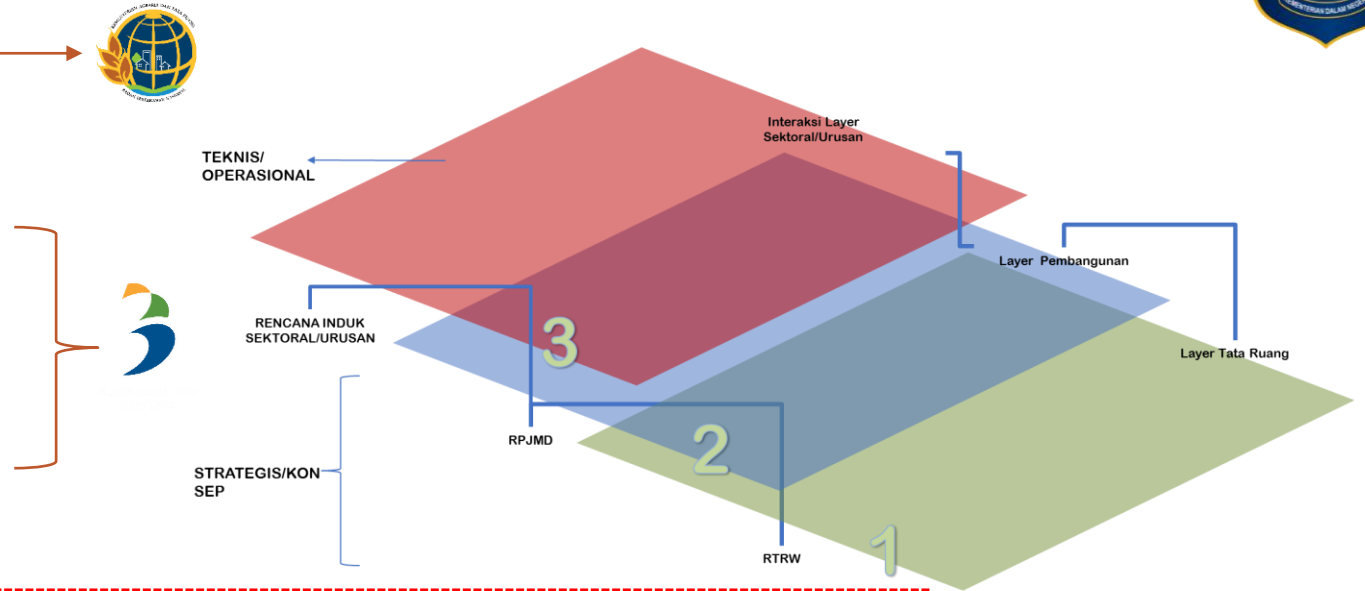
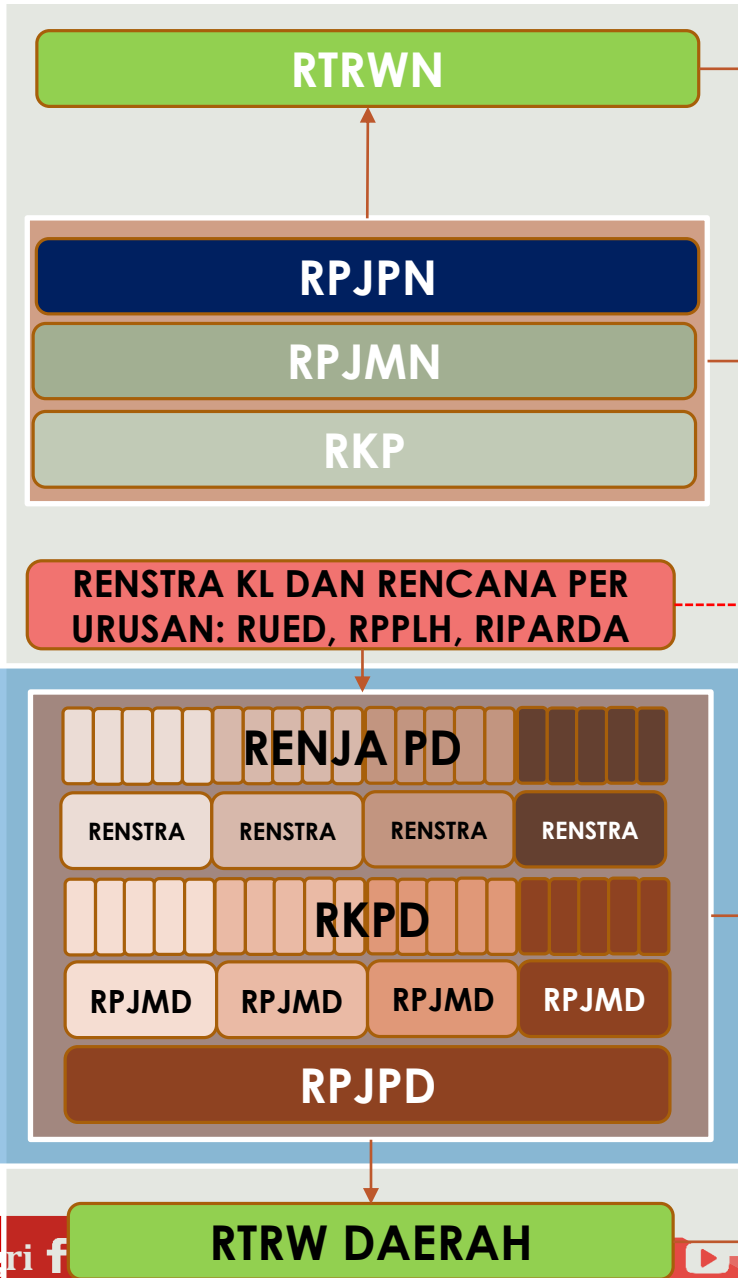
Proyek Prioritas Strategis pada RPJMN 2020-2024 dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, diwujudkan melalui sembilan Misi





PASAL 258 UU 23/2014: PEMBANGUNAN DAERAH MERUPAKAN BAGIAN INTEGRAL DARI PEMBANGUNAN NASIONAL

SINKRONISASI PEMBANGUNAN NASIONAL, PEMBANGUNAN DAERAH DAN TATA RUANG

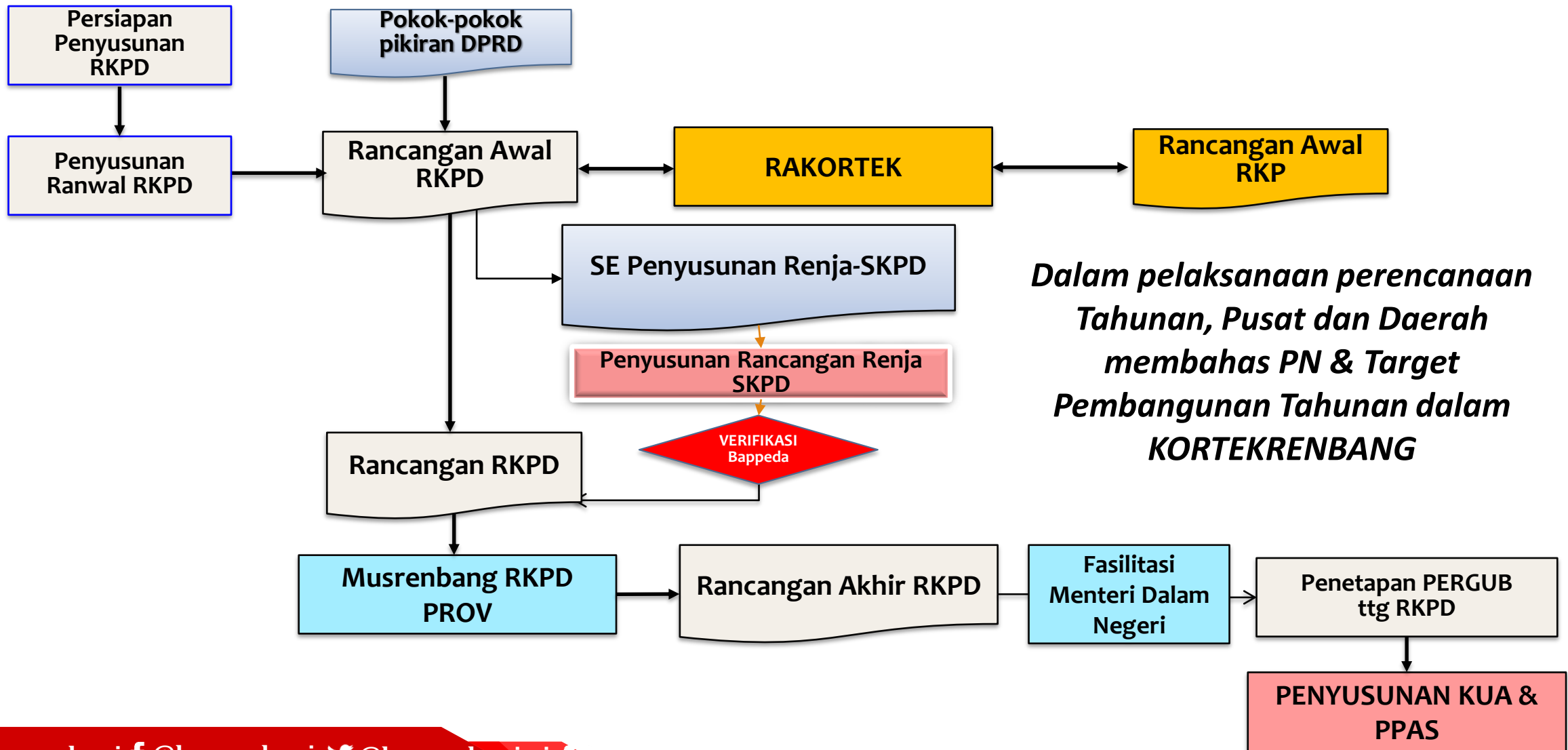


Pasal 258 UU 23/2014: Pembangunan Daerah → perwujudan dari pelaksanaan **Urusan Pemerintahan** yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

Pasal 20 UU 26/2007: RTRW menjadi pedoman untuk penyusunan RPJPN, RPJMN



HUBUNGAN RKPD DAN RKP DALAM RAKORTEK RENBANG





SINKRONISASI TARGET DAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DENGAN PRIORITAS & TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL



PRESIDEN

BAPPENAS

LAPORAN EVALUASI RPJMN

LAPORAN EVALUASI RKP

K/L

LAPORAN EVALUASI RENSTRA K/L

LAPORAN EVALUASI RENJA K/L

EVALUASI PENGUKURAN KINERJA

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM STRATEGIS

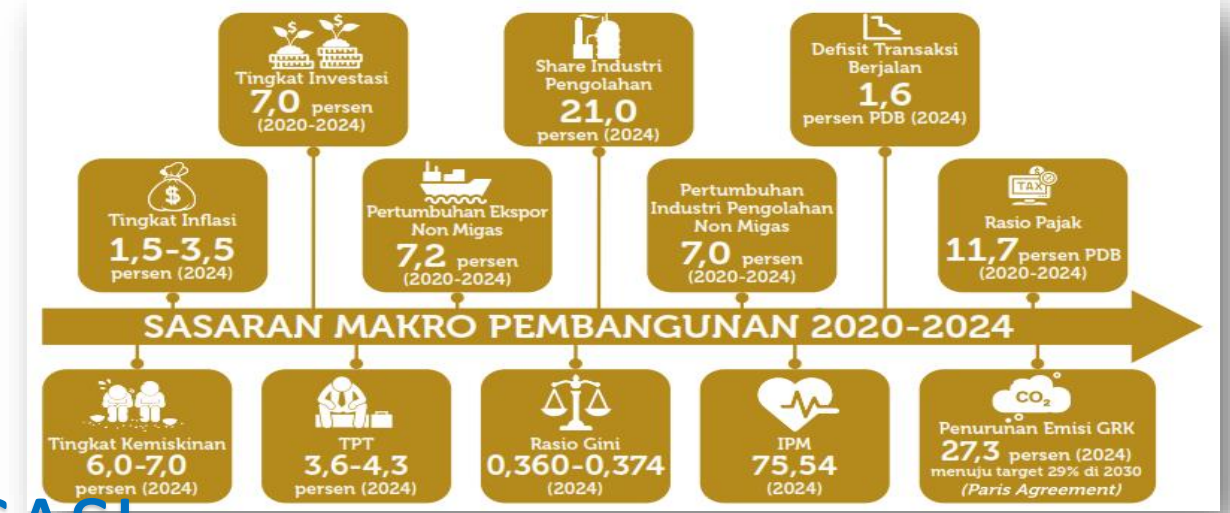
KEBIJAKAN SATU DATA, SPBE UNTUK PENGENDALIAN DAN PELAPORAN KINERJA PEMBANGUNAN

KRISNA



SINKRONISASI

TARGET MAKRO NASIONAL



- K/L
- BAPPENAS
- KEMENDAGRI
- PEMDA



TARGET MAKRO DAERAH

SIPD



TINDAK LANJUT SETELAH PELAKSANAAN KORTEKRENBANG

1. Hasil Kortekrenbang Tahun 2020 menjadi **acuan bagi Pemerintah Pusat** dalam pembahasan trilateral meeting antara Bappenas, KL dan Kemenkeu dalam Musrenbangnas untuk penyusunan RKP 2021
2. Hasil Kortekrenbang Tahun 2020 menjadi **acuan bagi Pemerintah Daerah** dalam pembahasan Musrenbang Prov, dan Musrenbang Kab/Kota untuk penyusunan RKPD 2021.
3. Tindak lanjut kortekrenbang **harus dikawal oleh Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat terhadap rancangan RKPD 2021 kab/kota** untuk memastikan bahwa RKPD 2021 kab/kota mendukung target pembangunan nasional.
4. Dalam penyusunan Ranwal RKP 2021 dan RKPD 2021 pelaksanaan **Kortekrenbang dikawal oleh KPK** sebagai langkah pencegahan korupsi.
5. Hasil kesepakatan Rakortekbang, Musrenbang RKPD Provisis/Kabupaten/Kota dan Musrenbangnas dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RKPD Tahun 2021, serta hasil Rakortekbang menjadi salah satu bahan reviu RKPD, KUA PPAS dan APBD oleh APIP Daerah.



TERIMA KASIH

